

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal merupakan hasil dari proses interaksi kebijakan yang melibatkan kepentingan domestik dan internasional serta kerja sama antara aktor publik dan aktor privat. Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal berperan sebagai fasilitator kebijakan yang menjembatani kepentingan investor, masyarakat lokal, dan strategi pembangunan nasional. Penetapan KEK Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sekaligus Proyek Strategis Nasional menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola kepentingan multi aktor dan menciptakan kesepakatan yang dapat diterima di berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hubungan internasional, kerjasama internasional dan negosiasi, khususnya terkait penerapan teori Two Level Games dan konsep Public Private Partnership (PPP) dalam kebijakan di Indonesia.

Strategi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menjembatani kepentingan domestik dan internasional untuk mencapai kesepakatan (*win-set*) yang memungkinkan KEK Kendal ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan melalui penguatan kapasitas domestik. Pemerintah Kabupaten Kendal berperan dalam menyiapkan prasyarat teknis dan administratif seperti kesiapan lahan, penyesuaian tata ruang, serta membangun dukungan lokal agar usulan KEK dapat diterima di tingkat provinsi dan nasional. Dalam kerangka Two Level Games Putnam, Pemerintah Kabupaten Kendal lebih banyak berperan pada Level II (domestik) dengan membangun dukungan internal, meningkatkan kesiapan kelembagaan, serta menciptakan kondisi yang dapat diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan

negosiasi juga dipengaruhi oleh stabilitas dan penerimaan di tingkat domestik.

Dalam menjembatani kepentingan internasional, Pemerintah Kabupaten Kendal berfokus pada penciptaan iklim investasi yang kondusif di tingkat lokal melalui fasilitasi perizinan dan dukungan terhadap operasional pengelola kawasan dan investor. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan utama dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan tetap berada pada pemerintah pusat, khususnya dalam menetapkan KEK Kendal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sekaligus Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah pusat memegang kewenangan strategis dalam menetapkan status KEK dan menyusun arah kebijakan investasi nasional. Dalam perspektif Two Level Games Putnam, peran Pemerintah Kabupaten Kendal bersifat terbatas sebagai fasilitator dan pelaksana di tingkat domestik. Pemerintah Kabupaten Kendal tidak memiliki kewenangan menentukan penetapan KEK, tetapi berperan dalam memperluas *win-set* di tingkat domestik melalui penguatan koordinasi internal birokrasi, penyelarasan berbagai isu sektoral yang terkait dengan investasi, serta pembinaan aktor lokal agar pelaksanaan investasi asing dapat berjalan lebih lancar dan tidak memunculkan penolakan yang besar dari masyarakat, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Dalam kompetisi regional Asia Tenggara, pemerintah pusat menjadi aktor kunci karena harus menghadapi kompetisi kebijakan investasi dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Melalui penetapan KEK sebagai instrumen nasional, pemerintah pusat berupaya meningkatkan daya saing Indonesia dengan menawarkan insentif, kepastian regulasi, serta integrasi kawasan industri ke dalam jaringan produksi regional. Oleh karena itu, KEK Kendal tidak hanya menjadi proyek pembangunan daerah, tetapi juga bagian dari strategi nasional Indonesia untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam kompetisi FDI di tingkat ASEAN.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun KEK Kendal tidak secara formal diklasifikasikan sebagai bagian dari Public Private Partnership (PPP) dalam regulasi nasional, tetapi pola pembagian peran dan mekanisme pelaksanaannya secara substantif mencerminkan karakteristik PPP. Pemerintah berperan dalam penyediaan kerangka regulasi, insentif, dan legitimasi kebijakan, sementara sektor swasta berkontribusi melalui penyediaan modal, pengelolaan kawasan, dan aktivitas ekonomi. Pola kemitraan ini memungkinkan adanya dorongan dalam percepatan pembangunan kawasan industri. Dengan demikian, keberhasilan penetapan KEK Kendal merupakan hasil kombinasi antara kesiapan domestik yang dibangun pemerintah daerah dan keputusan politik serta legitimasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran kepada pihak - pihak terkait terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola KEK perlu memperkuat koordinasi agar kebijakan KEK dapat dijalankan secara konsisten. Pemerintah pusat dapat semakin meningkatkan kualitas regulasi, khususnya terkait insentif, kepastian hukum, dan logistik, mengingat persaingan FDI di Asia Tenggara menuntut strategi yang tidak hanya berfokus pada insentif, tetapi juga pada kualitas ekosistem kawasan seperti infrastruktur, tenaga kerja terampil, dan stabilitas kebijakan. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan perizinan, memperbaharui peta potensi investasi, serta memperkuat pembinaan dan pengawasan agar investasi dapat berjalan lancar tanpa memicu konflik sosial. Pengelola KEK dan investor juga perlu memperluas kemitraan dengan UMKM lokal agar manfaat ekonomi kawasan lebih merata dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan kawasan semakin kuat.

Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam proses pembangunan KEK Kendal melalui forum komunikasi, mekanisme

pengaduan, dan dialog yang terbuka dengan pemerintah maupun pengelola kawasan. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tetap berjalan sesuai aturan, memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, serta memberikan manfaat nyata seperti penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha. Masyarakat juga dapat memiliki kesempatan dalam peningkatan kapasitas UMKM agar dapat beradaptasi dan masuk ke dalam rantai pasok industri yang berkembang di KEK, sehingga keberadaan kawasan tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga semakin memperkuat ekonomi lokal.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan data kuantitatif seperti data FDI, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM, serta dampak ekonomi lokal setelah adanya KEK Kendal. Penelitian juga dapat diperluas melalui studi perbandingan antara KEK Kendal dengan KEK lain di Indonesia atau kawasan industri di negara-negara ASEAN, sehingga dapat terlihat variasi strategi dan efektivitas kebijakan dalam menghadapi kompetisi di tingkat regional.